

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilu merupakan bagian dari kegiatan politik yang mendapat banyak perhatian dan partisipasi masyarakat, sehingga pemilu bisa menjadi momen pendidikan politik untuk mendewasakan masyarakat di suatu negara. Pada pemilu diajarkan kepada masyarakat supaya bisa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Tujuan dari dilaksanakannya pemilu adalah agar masyarakat bisa memilih pemimpin dan anggota legislatif yang akan membangun Indonesia baik secara fisik maupun non-fisik. Pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 merupakan pesta politik yang cukup kompleks yang diadakan di Indonesia.

Menurut Gleko (2017: 38), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum agar tujuan demokrasi dapat sepenuhnya tercapai. Meskipun pemilu telah rutin diadakan di Indonesia sejak awal-awal kemerdekaan, nilai-nilai demokrasi yang matang belum sepenuhnya terwujud karena sistem politik yang cenderung mengarah ke kepemimpinan otoriter. Titik terang menuju demokrasi yang lebih baik mulai terlihat pada Pemilu tahun 2004, yang berlangsung relatif lancar dan aman.

Pemerintahan yang demokratis diwujudkan melalui pemilihan umum (pemilu) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, kemudian sesuai dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemilu sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi di Indonesia. Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam pemilu, yang memberikan hak kepada mereka untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan keyakinan mereka. Pemilu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan siapa calon yang akan diberi amanah oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Agar pemilu dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan suatu strategi komunikasi yang dapat digunakan oleh KPU Kota Padang terkait dengan perannya sebagai penyelenggara pemilu. Strategi komunikasi yang dimaksud berfungsi sebagai penghubung antara KPU sebagai lembaga pemerintah dengan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955, yang berarti Indonesia butuh 10 tahun setelah mendeklarasikan kemerdekaan untuk melaksanakan pemilu. Pada tahun 1955 tersebut partisipasi mencapai 91,4%. Namun selanjutnya pemilu ini tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan baru pasca reformasi, setelah lengsernya Soeharto pada tahun 2004, masyarakat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, kemudian partai politik beserta kandidat-nya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara langsung. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka diaturlah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pada pemilu pertama era reformasi ini partisipasi pemilih mencapai 92,7%, kemudian pemilu legislatif mengalami penurunan hingga pemilu 2009. Selanjutnya pada pemilu 2014 mengalami peningkatan sebesar 75,11% dan juga meningkat menjadi 81,69% pada Pemilu tahun 2019. Persentase tersebut menunjukkan masih belum konsistennya angka partisipasi pemilih di Indonesia untuk berada di tren peningkatan.

Pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang kompleks dengan beragam permasalahan di dalamnya, karena terdapat lima jenis kotak suara, di antaranya kotak pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif secara bersamaan di satu waktu. KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan untuk bisa mengurai kerumitan teknis, dan mengurangi beban kerja berlebih petugas badan AdHoc di bawah KPU. Jika melihat dari Pemilu 2019 terdapat beberapa permasalahan teknis yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan pemilu yaitu: 5 kotak suara yang harus diisi dan dihitung, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara pemilu, kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, politik uang, informasi hoaks, peluang pelanggaran, kecurangan dalam pemilu, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang cukup menjadi perhatian adalah banyaknya penyelenggara yang meninggal dalam proses pemilu sebelumnya diduga karena kelelahan. KPU merilis jumlah terkait korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas pada Pemilu tahun 2019 mencapai 554 orang (Sumber: Laporan KPU).

Keterlibatan masyarakat dalam politik di negara demokratis adalah tolak ukur suksesnya pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara oleh rakyat, yang tercermin dalam partisipasi mereka dalam pemilu. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menandakan

bahwa rakyat aktif mengikuti, memahami, dan terlibat dalam urusan negara. Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah umumnya menunjukkan kurangnya apresiasi atau minat rakyat terhadap isu atau kegiatan pemerintah. Hal ini ditemukan oleh peneliti pada wawancara awal penelitian kepada beberapa pemilih pemula di mana pemilih tersebut kurang menaruh minat terhadap penyelenggaraan pemilu akibat perubahan yang tidak mereka rasakan setelah memilih, sehingga munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan sistem pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu (Haryono, 2018: 68).

Inti dari istilah golput adalah tindakan tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum. Fenomena ini telah ada sejak pemilu pertama pada tahun 1955, yang dipicu oleh kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai proses pemilu, sehingga pemilih tidak hadir di tempat pemungutan suara. Menurut Arianto (2011: 51), pada masa Orde Baru, golput sering diartikan sebagai bentuk protes moral terhadap sistem pemilu yang dianggap tidak demokratis oleh pemerintah. Golput menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi pemilih di Indonesia. Terdapat beberapa pandangan mengenai meningkatnya angka golput dari waktu ke waktu. Pertama, peningkatan ini dikaitkan dengan ketidakpuasan terhadap partai politik, yang dianggap lebih mementingkan kekuasaan daripada kepentingan masyarakat. Kedua, golput juga disebabkan oleh masalah administratif seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau adanya suara yang tidak sah.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu harus selalu memegang teguh aturan perundang-undangan, kode etik, dan tata tertib yang berlaku. Tugas dan wewenang KPU untuk menyelenggarakan pemilu tidak hanya berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam proses pemilu. Peran KPU sebagai lembaga yang memimpin jalannya pemilu sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komunikasi dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan KPU juga harus mengerti dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Informasi-informasi yang terkandung dalam sosialisasi nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan soal politik sehingga mereka lebih melek politik. Indonesia dengan keragaman suku bangsa dan budaya, menjadikan KPU harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Di beberapa daerah, KPU telah

banyak melakukan strategi dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan cara yang berbeda pula sesuai kondisi wilayahnya. KPU dibentuk oleh pemerintah dan berdiri secara hierarki dari KPU RI, KPU tingkat provinsi, dan KPU tingkat Kabupaten/Kota.

Begitu juga dengan salah satu KPU di tingkat daerah, seperti Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. KPU Kota Padang merupakan salah satu KPU tingkat kabupaten/kota yang akan menghadapi tantangan cukup besar dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Dilansir dari situs harian-haluan.com, pada pemilu tahun 2024, pemerintah Kota Padang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 menargetkan tingkat partisipasi pemilih yaitu sebesar 79,5 %, yang mana pada pemilu sebelumnya hanya sebesar 78,98%, sehingga untuk mencapai target yang sudah diusung tersebut perlu usaha ekstra dari KPU Kota Padang untuk mencapai target yang sudah dicanangkan, terutama terkait upaya pengencaran dari segi sosialisasi kepada pemilih. Oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi yang efektif untuk menyukseskan kegiatan pemilu ini, salah satunya adalah melalui sosialisasi ke masyarakat secara menyeluruh.

KPU Kota Padang mengutamakan komunikasi langsung dengan masyarakat melalui pendekatan tatap muka, yang dianggap efektif karena menekankan aspek sosial dan budaya. Metode ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu di Kota Padang. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU Kota Padang menggunakan dialog langsung untuk meningkatkan minat pemilih, yang menekankan interaksi langsung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Padang juga mencakup pendidikan bagi calon pemilih, di mana relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Padang mengutamakan dialog dan kearifan lokal. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, karena dialog memungkinkan mereka untuk menyampaikan ketidaktahuan mereka tentang mekanisme pemilu.

Penerapan model komunikasi yang efektif oleh KPU Kota Padang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi lembaga tersebut. Sesuai dengan harapan Henry (2003:71), hal ini akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai

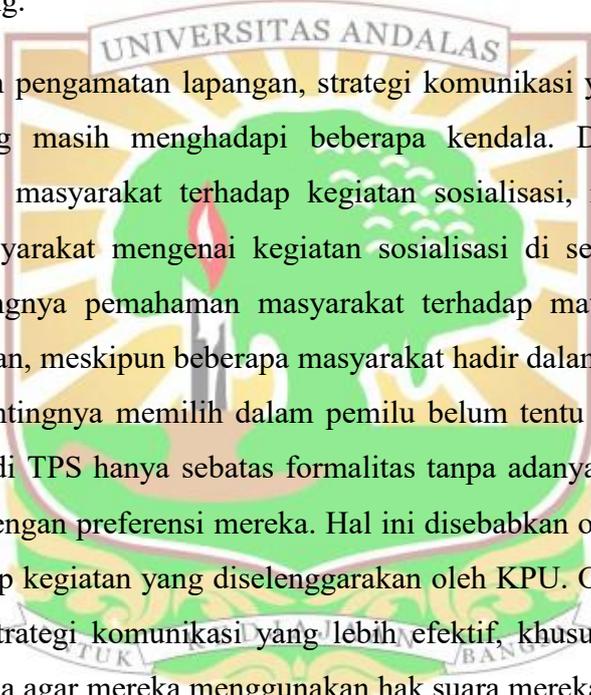
bentuk partisipasi politik. Dalam rangka mencapai visi dan misi, KPU Kota Padang terus mendorong para pegawainya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan jujur. Upaya ini dilakukan agar para pegawai memahami etos kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, KPU Kota Padang akan berusaha untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat di Kota Padang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan rencana strategis (renstra) KPU Kota Padang, pada Pemilu tahun 2019 sebanyak 592.162 orang tercatat sebagai pemilih tetap di Kota Padang, yang tersebar pada 2.453 TPS. Pada pemilu serentak 2019, Kota Padang mengalami kenaikan partisipasi pemilih yaitu pada pemilu ini tercatat sebesar jumlah partisipasi sebesar 79 persen untuk pemilu legislatif dan 80 persen untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Partisipasi warga Kota Padang mengalami sedikit peningkatan yaitu 15 persen dibanding pemilihan umum 2018 lalu yang hanya 63 persen. Namun angka ini juga sedikit menurun dibanding pemilu 2014 lalu yang sekitar 64 persen juga untuk pemilihan presiden. Dengan demikian, apabila dibandingkan pada pemilu 2014 maka KPU Kota Padang telah terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar sekitar 15 persen untuk pemilihan presiden. Kemudian untuk jumlah partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Padang sendiri, sebesar 76 persen, menurun dibanding angka partisipasi pada tahun 2019 yang sebesar 79 persen, sehingga perlu dilihat dari KPU Kota Padang bagaimana sosialisasi yang sudah dilakukan kepada pemilih.

Peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dibandingkan pemilu sebelumnya menimbulkan pertanyaan penting terkait Pemilu 2024. Perlu dianalisis apakah peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dan peserta pemilu. Selain itu, perlu dipertimbangkan kemampuan KPU Kota Padang dalam mempertahankan dan melanjutkan tren peningkatan partisipasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada bagaimana aktivitas komunikasi KPU Kota Padang berperan dalam menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih yang telah mengalami peningkatan pada pemilu presiden sebelumnya, agar tetap meningkat pada Pemilu 2024.

Berdasarkan berita dari kompas.com, Pemilu 2024 akan didominasi oleh pemilih muda atau pemilih pemula, yakni mereka yang berusia 17-40 tahun pada 14

Februari 2024. Persentase pemilih pemula diperkirakan mencapai 53-55 persen dari total pemilih di Indonesia, atau sekitar 107-108 juta dari 200 juta pemilih. Pemilih muda ini tergolong dalam generasi Z (17-21 tahun) dan generasi Milenial/y (22-40 tahun). Sehingga pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilih potensial yang akan sangat mempengaruhi jalannya pemilu. Namun ditemui oleh peneliti di beberapa observasi awal bahwa terdapat beberapa pemilih pemula yang memilih untuk tidak berpartisipasi pada pemilu karna adanya ketidakpercayaan pemilih muda ini terhadap proses jalannya pemilu, oleh karenanya KPU harus bisa mencari strategi sosialisasi dan teknik komunikasi yang tepat untuk diterapkan kepada pemilih muda ini, terkhususnya yang akan diteliti yaitu dalam lingkup pemilih pemula di KPU Kota Padang.



Berdasarkan pengamatan lapangan, strategi komunikasi yang diterapkan oleh KPU Kota Padang masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah kurangnya respons masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai kegiatan sosialisasi di sekitar tempat tinggal mereka, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi yang disampaikan. Bahkan, meskipun beberapa masyarakat hadir dalam kegiatan sosialisasi, kesadaran akan pentingnya memilih dalam pemilu belum tentu tumbuh. Terkadang, kehadiran mereka di TPS hanya sebatas formalitas tanpa adanya niat untuk memilih pemimpin sesuai dengan preferensi mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU. Oleh karena itu, KPU perlu merancang strategi komunikasi yang lebih efektif, khususnya untuk menarik minat generasi muda agar mereka menggunakan hak suara mereka.

Kajian mengenai pemilu tersebut akan dikaji dari sudut pandang ilmu komunikasi untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi KPU melalui kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Melalui kajian komunikasi dapat dilihat bagaimana strategi yang efektif untuk digunakan oleh KPU Kota Padang dalam melangsungkan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula guna mencapai target partisipasi yang sudah dicanangkan dalam RPJMN Kota Padang yaitu 79,5% pemilih dari total pemilih yang sudah terdata terkhususnya di Kota Padang. Melalui kajian komunikasi akan dilihat bagaimana proses komunikasi yang tepat dan sesuai dengan strategi komunikasi dari kegiatan sosialisasi dan kehumasan, sehingga akan terlihat bagaimana proses dari aktivitas komunikasi dari KPU Kota

Padang ke pemilih pemula nantinya ketika ke lapangan. Penelitian ini juga mendasarkan pada teori komunikasi persuasif, yang menyatakan bahwa persuasif adalah proses untuk mengubah pandangan dan perilaku, sehingga menghasilkan perubahan sikap pada pemilih pemula. Karena persuasif merupakan suatu proses, keberhasilannya dipengaruhi oleh teknik komunikasi dan faktor-faktor yang terkait dengan komponen komunikasi, seperti komunikator, saluran, dan komunikan, yang semuanya saling berhubungan.

Penelitian Dila Novita dkk. (2020) menunjukkan dialog dan komunikasi langsung efektif meningkatkan partisipasi pemilih milenial di Bekasi. Sementara itu, penelitian Khairatul Uma Daulay (2021) menemukan bahwa KPU Labuhan Batu menggunakan media sosial dan elektronik untuk sosialisasi kepada pemilih pemula, dengan metode yang disesuaikan untuk siswa, mahasiswa, dan masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan pemilih, ketidakpercayaan pada pemimpin, dan sikap apatis menjadi penyebab pemilih pemula enggan berpartisipasi. Kedua penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan target pemilih untuk meningkatkan partisipasi.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena akan fokus pada aktivitas komunikasi KPU Kota Padang melalui sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Perbedaan utamanya adalah penelitian ini akan mengamati proses kegiatan sosialisasi secara detail, mulai dari persiapan hingga evaluasi, sementara penelitian lain lebih berfokus pada strategi komunikasi umum. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana KPU Kota Padang melaksanakan kegiatan sosialisasi, dan untuk memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Kemudian peneliti juga ingin melihat bagaimana komunikasi persuasif yang digunakan oleh KPU Kota Padang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasinya kepada pemilih pemula. Berdasarkan paparan latar belakang dan urgensi dari penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “aktivitas komunikasi KPU Kota Padang melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana aktivitas komunikasi KPU Kota Padang melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka didapat tujuan dari penelitian ini adalah di bawah ini:

1. Untuk menganalisis aktivitas komunikasi KPU Kota Padang melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024.
2. Untuk menganalisis komunikasi persuasif KPU Kota Padang melalui kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024.

## 1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi karya yang bisa menambah pengetahuan di bidang kajian ilmu komunikasi terkait penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Kemudian diharapkan penelitian ini juga bisa memberikan sumbangan khazanah pemikiran sebagai bahan referensi dan rujukan penelitian, serta bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kajian terkait aktivitas komunikasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkhusus pemilih pemula pada Pemilu 2024.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara parktisnya diharap dapat memberikan solusi terkait bagaimana aktivitas komunikasi yang diterapkan dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 oleh KPU Kota Padang. Kemudian diharapkan dengan hasil penelitian ini kita dapat mengetahui komunikasi yang efektif dalam mengajak masyarakat untuk memilih pada pesta demokrasi yang merupakan tiang bagi tegaknya sistem demokrasi di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini sistematika pembahasannya dibagi dalam tiga bab dan beberapa turunan subbab yang mana saling memiliki keterkaitan pada penelitian ini. Peneliti menulis sistematika ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal penelitian, di bawah ini diuraikan sistematika penulisannya:

- BAB I** : Bab pendahuluan yang di antaranya latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kemudian bab tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu, kerangka konseptual, kerangka teoritis dan kerangka pemikiran.
- BAB III** : Metodologi penelitian yang di antaranya jenis penelitian, paradigma, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validasi data, lokasi dan waktu penelitian.
- BAB IV** : Gambaran umum/Profil informan dan profil tempat yang diteliti.
- BAB V** : Bab hasil dan pembahasan penelitian, pada bab ini dikaitkan dengan data yang diperoleh serta di elaborasi dengan kerangka konseptual dan kerangka teoritis.
- BAB VI** : Kesimpulan dari penelitian dan saran untuk penelitian sejenis serta dalam hal ini KPU Kota Padang ke depannya.

